



Komplektasi Perilaku Politik Pemilih Dalam Pilkada Serentak 2024 Pada Aspek Integrasi Tradisi Lokal Dan Teknologi

Ardhia Rachma Cahyani✉

Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Disubmit: Januari

Direvisi: Februari

Diterima: Maret

Keywords:

Voter Behavior, 2024

Pilkada, Local

Traditions, Digital

Technology.

Abstrak

Pilkada serentak 2024 menjadi momen penting dalam perjalanan demokrasi lokal di Indonesia. Artikel ini menganalisis kompleksitas perilaku politik pemilih dalam Pilkada, yang dipengaruhi oleh integrasi tradisi lokal dan teknologi digital. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif, penelitian ini mengidentifikasi tiga tipe utama pemilih: emosional, rasional, dan situasional. Peran tradisi lokal dan pengaruh media sosial dalam membentuk preferensi politik menjadi fokus utama. Temuan menunjukkan bahwa kampanye yang memadukan tradisi lokal dan teknologi memiliki potensi meningkatkan partisipasi politik secara signifikan. Namun, disinformasi dan polarisasi tetap menjadi tantangan besar dalam proses demokrasi ini. Saran untuk masyarakat diharapkan dapat mencari informasi yang valid dan akurat tentang program kerja serta rekam jejak kandidat, terutama dalam memanfaatkan media sosial yang sering menjadi sumber informasi utama. Pemilih harus berhati-hati terhadap hoaks dan manipulasi informasi yang dapat memengaruhi keputusan politik secara emosional tanpa dasar yang objektif. Tidak hanya memilih pada saat Pilkada, masyarakat juga harus aktif mengawasi pelaksanaan kebijakan dan memberikan masukan kepada pemimpin terpilih untuk memastikan komitmen terhadap janji kampanye.

Abstract

The 2024 simultaneous regional elections (Pilkada) mark an important moment in Indonesia's local democracy. This article analyzes the complexity of voter political behavior, influenced by the integration of local traditions and digital technology. Using a qualitative-descriptive approach, this study identifies three main types of voters: emotional, rational, and situational. The role of local traditions and the influence of social media in shaping political preferences are the main focus. The findings show that campaigns combining local traditions and technology have the potential to significantly increase political participation. However, disinformation and polarization remain major challenges in this democratic process. Advice for the public is expected to seek valid and accurate information about the work program and track record of candidates, especially in utilizing social media which is often the main source of information. Voters must be careful of hoaxes and information manipulation that can influence political decisions emotionally without an objective basis. Not only voting during the Pilkada, the public must also actively monitor the implementation of policies and provide input to elected leaders to ensure commitment to campaign promises.

PENDAHULUAN

Sejarah Pilkada di Indonesia mencerminkan perjalanan panjang menuju demokrasi yang lebih inklusif dan desentralisasi kekuasaan. Dimulai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yang memberikan wewenang kepada daerah untuk memilih pemimpin secara langsung, Pilkada telah menjadi simbol kedaulatan rakyat dalam menentukan arah pembangunan lokal (Alfarobbi, 2024: 12). Secara filosofis, Pilkada serentak 2024 menegaskan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945. Prinsip ini mencerminkan keyakinan bahwa rakyat adalah sumber utama legitimasi kekuasaan, sekaligus menegaskan komitmen terhadap demokrasi deliberatif di mana partisipasi aktif masyarakat menjadi elemen kunci (Zamhasari, 2024: 875).

Dalam aspek historis, perilaku pemilih di Indonesia telah berkembang dari pola yang didominasi oleh patronase tradisional menuju pengaruh modern seperti teknologi digital. Era digital membawa perubahan besar dalam cara masyarakat mengakses informasi politik, membentuk opini, dan memutuskan pilihan (Simatupang, 2024: 442). Di sisi lain, multikulturalisme di Indonesia menjadikan Pilkada lebih kompleks karena preferensi politik sering kali dipengaruhi oleh identitas sosial seperti agama, etnis, dan hubungan patron-klien (Ramadhan & Ridwan, 2024: 200). Secara filosofis, kondisi ini menggambarkan dialektika antara tradisi dan modernitas, di mana nilai-nilai lokal bertemu dengan dinamika global.

Pilkada serentak 2024 dilandasi oleh kerangka hukum yang kuat, termasuk Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Regulasi ini tidak hanya mengatur teknis penyelenggaraan Pilkada tetapi juga menegaskan prinsip-prinsip normatif seperti keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam demokrasi (Astuti et al., 2025: 83).

Dalam konteks yuridis, pelaksanaan Pilkada mencerminkan penerapan hak politik warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28D Ayat (3) UUD 1945, yang memberikan hak kepada setiap individu untuk berpartisipasi

dalam pemerintahan. Hal ini menjadikan Pilkada sebagai sarana implementasi kedaulatan rakyat secara langsung, sekaligus upaya untuk menjunjung supremasi hukum dalam proses demokrasi. Dalam Pilkada serentak 2024 pemahaman terhadap perilaku pemilih menjadi sangat penting untuk mengevaluasi sejauh mana demokrasi telah berfungsi secara efektif di tingkat lokal.

Kompleksitas perilaku pemilih, yang dipengaruhi oleh tradisi lokal, identitas sosial, dan teknologi modern, membutuhkan pendekatan historis, filosofis, dan normatif-yuridis untuk memahami dinamika yang terjadi. Dengan menganalisis faktor-faktor tersebut, diharapkan dapat ditemukan strategi yang lebih inklusif dan berorientasi pada penguatan demokrasi lokal (Bafadal, 2024: 180). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran tradisi lokal dan teknologi dalam membentuk perilaku politik pemilih pada Pilkada serentak 2024. Penelitian ini berupaya memberikan pemahaman mendalam mengenai bagaimana integrasi kedua faktor ini dapat meningkatkan kualitas partisipasi politik masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data diperoleh dari studi pustaka, wawancara, dan observasi terhadap berbagai Pelaksanaan Pilkada sebelumnya. Analisis dilakukan melalui teknik tematik untuk mengidentifikasi pola dan dinamika yang memengaruhi perilaku pemilih.

PEMBAHASAN

Teori Perilaku Politik Pemilih dalam Konteks Modern Perilaku politik pemilih dapat dijelaskan melalui tiga pendekatan utama: pemilih emosional, rasional, dan situasional. Ketiga pendekatan ini berakar pada teori-teori yang dikemukakan oleh ahli seperti Anthony Downs (1957), Paul Lazarsfeld (1944), dan Angus Campbell (1960), yang menawarkan perspektif berbeda namun saling melengkapi dalam memahami dinamika keputusan politik pemilih (Primagara & Yulianita, 2024: 35).

Paul Lazarsfeld dalam "The People's Choice" (1944) menjelaskan bahwa keputusan politik sering kali dipengaruhi oleh ikatan emosional dan lingkungan sosial pemilih, seperti keluarga, teman, atau kelompok agama. Pemilih emosional cenderung membuat pilihan berdasarkan perasaan simpati atau keterikatan terhadap kandidat tertentu, bukan pada pertimbangan rasional. Dalam konteks modern, media sosial menjadi alat yang sangat efektif untuk membangun koneksi emosional antara kandidat dan pemilih, sering kali melalui narasi yang menyentuh hati atau menonjolkan simbol-simbol identitas (Saputro et al., 2024: 141).

Anthony Downs, dalam "An Economic Theory of Democracy" (1957), memperkenalkan konsep pemilih sebagai agen rasional yang membuat keputusan berdasarkan analisis untung-rugi. Pemilih rasional mengevaluasi program kerja, rekam jejak kandidat, dan relevansi kebijakan yang ditawarkan dengan kebutuhan mereka. Mereka cenderung memilih kandidat yang dianggap memberikan manfaat terbesar, baik untuk individu maupun komunitas (Jaelani, 2024: 45).

Pendekatan situasional, seperti yang dikembangkan oleh Angus Campbell dan koleganya dalam "The American Voter" (1960), menekankan bahwa keputusan pemilih dipengaruhi oleh konteks atau isu-isu tertentu yang mendesak. Pemilih situasional tidak memiliki loyalitas politik yang tetap, tetapi lebih fleksibel dalam menentukan pilihannya berdasarkan relevansi isu lokal atau kebijakan kandidat pada saat itu. Misalnya, dalam Pilkada, isu infrastruktur atau bencana alam di suatu daerah dapat menjadi faktor utama yang memengaruhi keputusan pemilih (Cahaya, 2024: 89).

Integrasi Tradisi Lokal dalam Pilkada
Tradisi lokal memainkan peran penting dalam membentuk preferensi politik pemilih, terutama dalam konteks masyarakat multikultural seperti Indonesia. Sebagai contoh, adat istiadat, agama, dan sistem patronase sering menjadi elemen kunci dalam menentukan dukungan politik masyarakat (Ramadhan & Ridwan, 2024: 198). Kampanye yang berhasil biasanya mampu

memanfaatkan nilai-nilai tradisional ini untuk membangun kedekatan emosional dengan pemilih. Namun, tantangan muncul ketika tradisi lokal bertentangan dengan nilai-nilai modern atau ketika digunakan untuk memanipulasi hasil Pilkada.

Kandidat yang mengintegrasikan simbol-simbol budaya lokal dalam kampanye mereka sering kali lebih mampu menjangkau pemilih di daerah tertentu. Sebagai contoh, di Jepara, kandidat yang menonjolkan komitmen terhadap pelestarian seni ukir lokal berhasil mendapatkan simpati masyarakat (Sholeha & Herawati, 2024: 187). Sebagai contoh, wawancara dengan pemilih dari daerah dengan kekayaan budaya seperti Jepara menunjukkan bahwa perhatian kandidat terhadap pelestarian budaya lokal menjadi salah satu faktor penentu pilihan mereka.

Fenomena politik identitas kerap menjadi alat politik yang digunakan untuk membangun kohesi sosial dan memperoleh dukungan komunitas tertentu. Identitas berbasis etnis, agama, atau kelompok sosial sering kali diangkat sebagai narasi kampanye untuk menarik simpati pemilih. Namun, di sisi lain, politik identitas juga memiliki potensi menciptakan fragmentasi sosial jika tidak dikelola dengan bijak. Beberapa pemilih, seperti yang berasal dari Purbalingga, menyebutkan pentingnya program yang mendukung usaha kecil menengah (UMKM) yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal, menunjukkan bahwa identitas juga dapat menjadi sarana pemberdayaan ekonomi.

Pengintegrasian tradisi lokal dalam kampanye politik memiliki keuntungan besar dalam membangun kedekatan emosional antara kandidat dan pemilih. Kandidat yang mampu menunjukkan keterlibatan dan kepedulian terhadap budaya setempat cenderung mendapatkan kepercayaan yang lebih tinggi dari masyarakat. Namun, di sisi lain, terlalu bergantung pada tradisi lokal dapat menghambat inovasi dalam kebijakan dan menimbulkan eksklusivitas yang meminggirkan kelompok lain.

Dalam menyusun strategi kampanye kandidat perlu menggabungkan nilai-nilai

tradisional dengan pendekatan modern untuk menjangkau beragam segmen pemilih. Kampanye yang mengintegrasikan simbol-simbol budaya lokal dengan teknologi digital, seperti media sosial, dapat meningkatkan partisipasi politik tanpa mengesampingkan sensitivitas budaya. Hal ini memberikan keseimbangan antara penghormatan terhadap tradisi lokal dan kebutuhan masyarakat akan kebijakan yang relevan dan progresif.

Media sosial telah menjadi salah satu platform utama dalam menyampaikan informasi politik dan menjangkau pemilih dalam Pilkada serentak 2024. Berdasarkan wawancara yang terdapat dalam dokumen, banyak pemilih menyebutkan bahwa media sosial memengaruhi pandangan politik mereka secara signifikan. Misalnya, Ghayani Asmeera dan Najwa Insyirah Shafa menyebutkan bahwa media sosial membantu mereka memahami aktivitas dan visi calon tanpa harus menghadiri kampanye langsung.

Calon kepala daerah menggunakan media sosial untuk membangun citra, mempromosikan program kerja, dan menjangkau pemilih secara personal. Platform seperti Instagram, Twitter, dan TikTok menjadi medium untuk menyampaikan pesan kampanye dengan cara yang lebih visual, menarik, dan interaktif. Media sosial juga memberikan ruang bagi pemilih untuk berpartisipasi dalam diskusi politik atau menilai kandidat berdasarkan interaksi langsung mereka.

Namun, media sosial juga membawa tantangan serius dalam membentuk opini publik. Sebagian pemilih, seperti yang disampaikan oleh Naila dan Adhwa, menyadari bahwa media sosial tidak selalu menjadi sumber informasi yang dapat diandalkan, karena banyaknya hoaks dan informasi yang tidak terverifikasi. Disinformasi dapat merusak kepercayaan publik terhadap proses politik dan menciptakan polarisasi di antara kelompok pemilih.

Selain itu, adanya narasi partisan dan manipulatif sering kali memanfaatkan emosi pemilih, terutama bagi mereka yang kurang memiliki kemampuan literasi digital. Polarisasi yang diakibatkan oleh disinformasi ini dapat memengaruhi kohesi sosial, yang seharusnya

menjadi salah satu tujuan dari proses demokrasi lokal.

Penggunaan media sosial dalam politik juga memperlihatkan adanya perbedaan efek pada generasi muda dan generasi tua. Generasi muda, seperti yang diwakili oleh responden seperti Najwa dan Chelchi, lebih aktif menggunakan media sosial sebagai sumber utama informasi politik mereka. Mereka cenderung responsif terhadap narasi visual yang menarik dan sering kali terlibat dalam diskusi online terkait kebijakan atau kandidat. Sebaliknya, generasi tua mungkin lebih mengandalkan media tradisional atau sumber informasi langsung seperti diskusi komunitas. Meskipun demikian, mereka juga mulai terpapar oleh pengaruh media sosial, meskipun intensitas dan pola konsumsi mereka berbeda dibandingkan generasi muda.

Strategi kampanye yang efektif harus dimulai dengan pemahaman mendalam tentang karakteristik demografi pemilih, seperti usia, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan akses terhadap teknologi. Data dari wawancara menunjukkan bahwa generasi muda lebih responsif terhadap kampanye yang memanfaatkan media sosial dan narasi visual, sedangkan generasi yang lebih tua cenderung menghargai diskusi berbasis program kerja yang realistis.

Dengan memanfaatkan data ini, kandidat dapat menyesuaikan pesan kampanye untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing kelompok. Sebagai contoh, narasi tentang pembangunan infrastruktur dan pengembangan UMKM yang relevan di Purbalingga dan Jepara bisa diprioritaskan untuk menarik perhatian pemilih situasional. Media sosial, seperti yang diakui oleh banyak responden, memainkan peran penting dalam membangun citra dan menyebarkan pesan politik. Platform seperti Instagram, TikTok, dan Twitter dapat digunakan untuk menyampaikan narasi yang menarik, seperti pencapaian kandidat, testimoni dari masyarakat, atau simulasi dampak program kerja. Namun, penting bagi kandidat untuk menggunakan media sosial secara etis. Informasi yang disampaikan harus

akurat dan transparan, sehingga tidak menimbulkan kebingungan atau ketidakpercayaan di kalangan pemilih. Strategi kreatif, seperti video pendek yang menggambarkan solusi konkret atas isu-isu lokal, dapat membantu meningkatkan partisipasi tanpa memanipulasi emosi pemilih.

Kandidat juga perlu mempertimbangkan sensitivitas budaya lokal dalam menyusun kampanye mereka. Tradisi lokal, seperti yang dicatat dalam wawancara dari Jepara dan Purbalingga, dapat menjadi elemen yang kuat dalam membangun koneksi emosional dengan pemilih. Narasi yang mengangkat nilai-nilai lokal dapat diintegrasikan dengan pendekatan digital untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Sebagai contoh, kampanye yang menampilkan konten budaya lokal dalam format digital, seperti video tentang seni tradisional atau kisah inspiratif dari komunitas lokal, dapat meningkatkan daya tarik kandidat. Ini tidak hanya menunjukkan kepedulian kandidat terhadap warisan budaya, tetapi juga memperkuat keterhubungan mereka dengan masyarakat.

SIMPULAN

Pilkada serentak 2024 menjadi momen penting dalam perjalanan demokrasi lokal di Indonesia, mencerminkan kompleksitas perilaku politik pemilih yang dipengaruhi oleh tradisi lokal, teknologi digital, dan dinamika sosial. Perilaku pemilih dapat dikelompokkan menjadi tiga tipe utama: pemilih emosional, rasional, dan situasional, yang masing-masing menunjukkan pola pengambilan keputusan yang unik. Pemilih emosional cenderung dipengaruhi oleh narasi yang menyentuh perasaan, pemilih rasional berfokus pada analisis program kerja dan manfaat konkret, sedangkan pemilih situasional dipengaruhi oleh isu spesifik yang relevan dengan kondisi lokal.

Dalam konteks modern, teknologi, terutama media sosial, memainkan peran penting dalam membentuk preferensi pemilih. Media sosial digunakan sebagai alat kampanye, meskipun juga membawa tantangan berupa disinformasi dan polarisasi. Sementara itu,

tradisi lokal tetap menjadi elemen signifikan, baik sebagai alat membangun kedekatan emosional dengan pemilih maupun sebagai penguat legitimasi kandidat.

Untuk memastikan pelaksanaan Pilkada yang efektif dan berkualitas, strategi kampanye yang relevan diperlukan, menggabungkan pendekatan berbasis data, narasi tradisi lokal, dan pemanfaatan teknologi secara etis. Pemahaman mendalam terhadap preferensi pemilih ini diharapkan tidak hanya meningkatkan partisipasi masyarakat tetapi juga memperkuat kepercayaan terhadap proses demokrasi lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Falah, L. (2024). Partisipasi politik masyarakat pendatang pada pilkada serentak 2020 di kelurahan rancaekek kencana kecamatan rancaekek kab. Bandung (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Alfarobbi, F. W. (2024). Civic Participation Pemilih Golongan Muda Pada Pemilu 2024 Di Desa Tanjung, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung.
- Astuti, E., Suherman, A. M., & Setiady, T. (2025). Implikasi Hukum Pidana Penyalahgunaan Data Pribadi Kasus Dharma Pongrekun Pilkada Jakarta Berdasarkan Teori Penegakan Hukum. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 2(1), 81-95.
- Bafadal, R. E. (2024). Peningkatan Partisipasi Memilih Pada Pemilu 2024 dengan Pendaftaran Pemilih Berkelanjutan. *Sejahtera: Jurnal Inspirasi Mengabdikan Untuk Negeri*, 3(3), 176-187.
- Cahaya, P. (2024). Strategi komisi pemilihan umum kota jambi dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan Gubernur dan wakil gubernur Jambi tahun 2024 (Doctoral dissertation, Universitas Jambi).
- Jaelani, R. (2024). Sosialisasi Politik Bagi Pemilih Pemula Menjelang Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi

- Sumatera selatan (doctoral dissetrtation, institut pemerintahan dalam negeri).
- Primagara, M., & Yulianita, N. (2024). Tiktok Sebagai Sumber Informasi Pemilih Pemula Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu*, 1(6), 32-40.
- Ramadhan, A. F., & Ridwan, R. (2024). Analisis Sosiologi Politik dalam Pemenangan Pasangan Calon Mohammad Idris dan Imam Budi Hartono pada Pilkada 2020 di Kota Depok. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 7(2), 194-209.
- Saputro, E. R., Adam, A. F., & Haris, U. (2024). Pendidikan Politik bagi Gen Z dalam Menyongsong Pemilukada Tahun 2024 di Kabupaten Merauke. *Fundamentum: Jurnal Multidisiplin*, 2(4), 139-147.
- Sholeha, S. M. A., & Herawati, N. R. (2024). Peningkatan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Masa Pandemi Covid-19 2020 Di Kota Bandar Lampung. *Journal of Politic And Government Studies*, 13(2), 182-202.
- Simatupang, Y. (2024). Dinamika politik dan pilkada di kota kendari: Analisis Pengaruh Media Sosial dalam Kampanye Politik Lokal. *Journal Publicuho*, 7(1), 439-447.
- Zamhasari, Z. (2024). Dampak Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Terhadap Demokrasi: Tinjauan Kelebihan Dan Kekurangan Pilkada Serentak Di Indonesia Tahun 2024. *Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora*, 3(10), 873-880.